

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2019 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2017, proyeksi Tahun 2018 dan 2019. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2017, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019. Bagian akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2019.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan RKPD tahun ke 2 RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dalam konteks ini, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2019 diharapkan mampu mencapai misi ke 5 RPJMD yakni Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. Secara detail, misi ke 2 bermakna Pembangunan Ekonomi Banten melalui peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi perikanan, penataan destinasi wisata, pembangunan pusat distribusi provinsi, peningkatan akses modal dan pasar untuk koperasi, industri kecil dan ekonomi kreatif, peningkatan pelayanan perijinan bagi investor, peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja dan pengawasan dan penempatan ketenagakerjaan.

Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Empat indikator utama yang mewakilinya disajikan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Target Pembangunan Ekonomi Banten Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6.00	6.20	6.40	6.70	7.00
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8.45	8.20	7.95	7.68	7.40
Angka Kemiskinan	Persen	5.13	5.00	4.87	4.74	4.60
Gini Ratio	Poin	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37

Sumber : RPJMD Banten 2017-2022

Angka-angka target pembangunan ekonomi tersebut sangat optimis karena dibuat pada awal perencanaan dengan asumsi kondisi ekonomi global dan nasional dalam kondisi baik.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

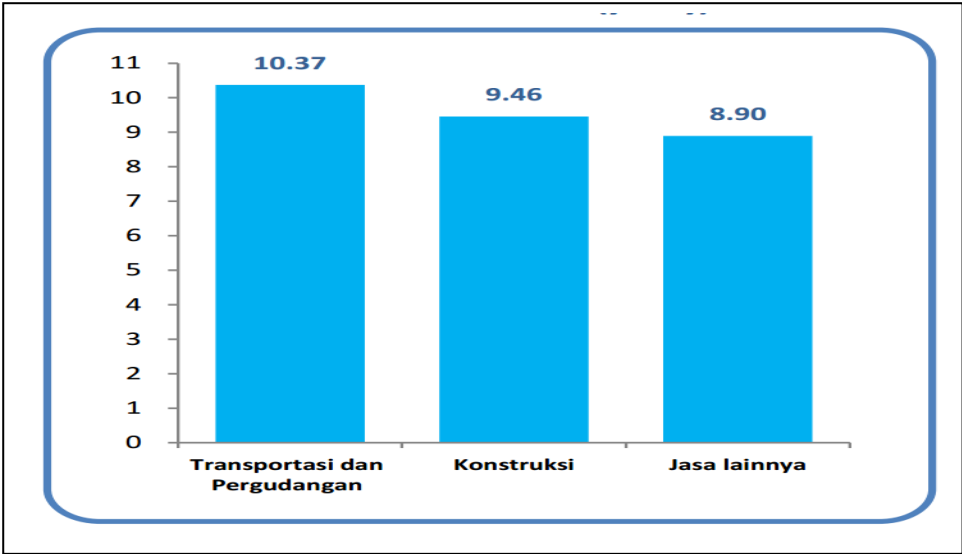
PDRB Provinsi Banten menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor- faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha

masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Provinsi Banten yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan.

a. PDRB menurut Lapangan Usaha

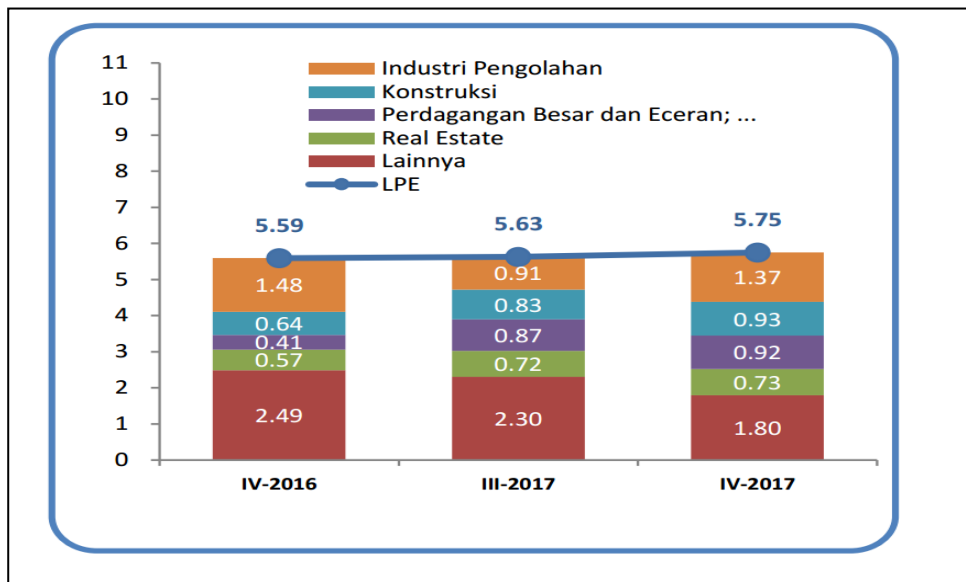
Perekonomian Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2017 mencapai Rp 146,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 104,97 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75% Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 10,37 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalan yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,34 persen dan 1,95 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,37 persen, diikuti Konstruksi sebesar 9,46 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 8,90 persen.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan IV-2017



Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Gambar 3.2
Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulanan IV-2017



Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Struktur PDRB Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi dan Pergudangan masih mendominasi PDRB Banten.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV-2017, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,37 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,93 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,92 persen; Real Estate sebesar 0,73 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,67 persen.

b. PDRB menurut Pengeluaran

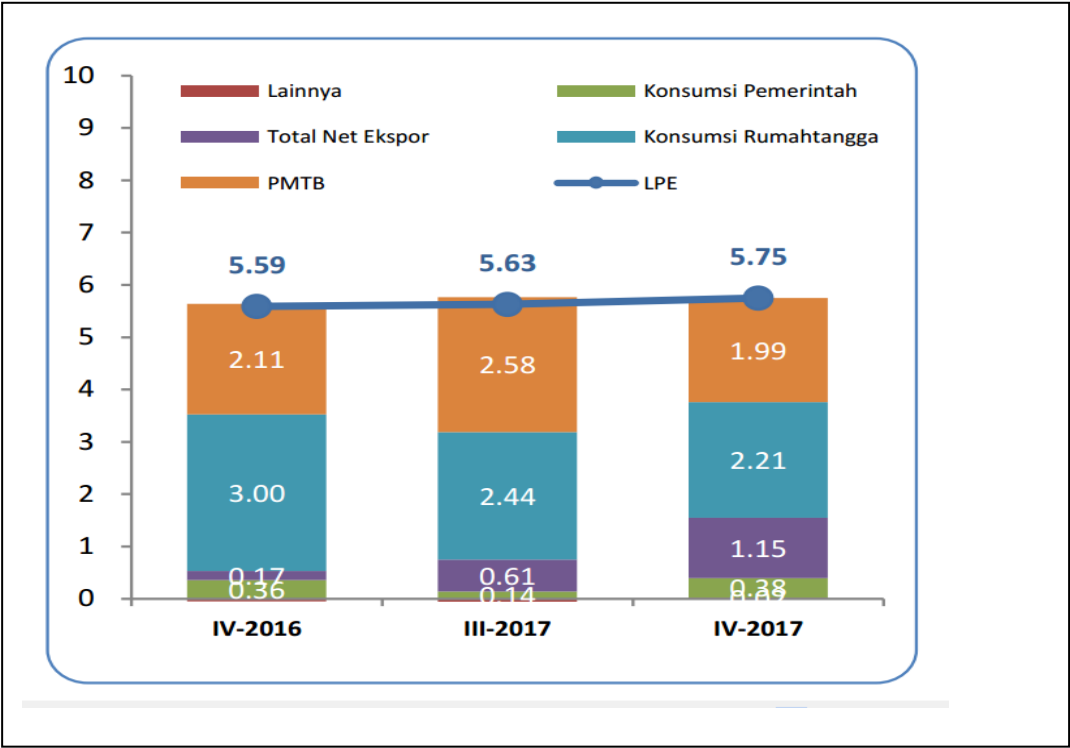
Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV-2017 terhadap triwulan IV-2016 terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 23,71 persen; diikuti komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 6,89 persen; dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 6,35 persen.

Struktur PDRB Banten menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Banten atau sebesar 51,14 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berurutan adalah Komponen PMTB sebesar 31,34 persen; Total Net Ekspor sebesar 11,24 persen; dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,77 persen, sedangkan peranan Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) dan Perubahan inventori relatif kecil yaitu kurang dari 1 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV 2017, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen dengan andil tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 2,21 persen; diikuti Komponen Pengeluaran PMTB sebesar 1,99 persen; dan komponen Total Net Ekspor yang memberikan andil sebesar 1,15 persen.

Gambar 3.3
Sumber Pertumbuhan Beberapa Komponen
Triwulanan IV-2017



Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Tabel 3.2
Struktur PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 dan 2017 (Persen)

Lapangan Usaha (1)	2016			2017		
	Tri II-2016 (2)	Tri III-2016 (3)	Tri IV-2016 (4)	Tri II-2017 (5)	Tri III-2017 (6)	Tri IV-2017 (7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,07	6,30	5,77	6,04	6,16	4,99
B. Pertambangan dan Penggalian	0,80	0,78	0,77	0,73	0,73	0,71
C. Industri Pengolahan	32,59	32,36	32,32	32,00	31,44	31,60
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,46	2,14	2,16	2,16	2,08	2,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F. Konstruksi	10,02	10,28	10,75	10,05	10,57	11,12
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,32	12,13	12,09	12,34	12,32	12,26
H. Transportasi dan Pergudangan	10,46	10,87	10,88	10,80	10,89	11,36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,35	2,38	2,42	2,38	2,39
J. Informasi dan Komunikasi	3,52	3,55	3,55	3,68	3,68	3,61
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,02	3,03	3,06	3,00	2,98	3,04
L. Real Estate	7,18	7,16	7,16	7,45	7,50	7,44
M,N. Jasa Perusahaan	1,04	1,04	1,05	1,08	1,08	1,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,07	2,03	2,02	2,06	2,03	2,02
P. Jasa Pendidikan	3,28	3,21	3,23	3,34	3,32	3,40
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,15	1,16	1,17	1,19	1,20
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,56	1,54	1,58	1,61	1,59	1,61
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Banten
 Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Perkembangan PDRB Provinsi Banten mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Provinsi Banten semakin mengalami kemajuan. Kenaikan PDRB Provinsi Banten ini di sebabkan berbagai faktor, salah faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB Provinsi Banten adalah investasi. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi Provinsi Banten baik industri, pariwisata, perdagangan, ataupun pendidikan.

Selain itu jumlah industri dan tenaga kerja juga merupakan faktor pendukung dari pertambahan PDRB Provinsi Banten. Selain faktor internal tersebut faktor eksternal juga dapat mempengaruhi PDRB Banten seperti *regional spillover* atau pengaruh daerah batas. Perkembangan

daerah perbatasan atau daerah sekitar Banten tersebut juga akan dapat berpengaruh positif atau dapat menjadi faktor pendorong tumbuhnya PDRB Banten.

Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi *Renaissance* Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di Banten. Peningkatan PDRB tersebut harus dilandasi semangat *Renaissance* Provinsi Banten, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Target laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh menjadi 6,8-7,0% pada Tahun 2017 sebagai tahun akhir dari RPJMD Provinsi Banten 2012-2017. Sedangkan pertumbuhan masing-masing kabupaten/kota ditunjukkan pada Tabel 3.4. Kota Tangerang dan Kota Cilegon adalah dua daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi terendah. Di Tahun 2016, namun pada tahun 2018 di proyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon Mengalami kenaikan dan tumbuh sebesar 5,96%, untuk Kota Tangerang masih yang terendah hanya tumbuh sebesar 5,38%. Sementara Kota Tangerang Selatan adalah daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sekitar 8,51% pada tahun 2018.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2015-2018 (dalam %)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018*
01 Kab. Pandeglang	5.01	5.97	6.01	6.31	6.43
02 Kab. Lebak	6.04	5.93	5.75	6.04	6.16
03 Kab. Tangerang	5.76	5.39	5.17	5.64	5.69
04 Kab. Serang	5.99	5.14	5.04	5.39	5.50
05 Kota Tangerang	5.64	5.58	5.03	5.23	5.38
06 Kota Cilegon	4.93	4.81	4.71	5.42	5.96
07 Kota Serang	7.07	6.43	6.37	7.13	8.20
08 Kota Tangsel	8.50	7.25	7.10	7.81	8.51

Keterangan: angka Tahun 2016*, 2017*, dan 2018* adalah hasil proyeksi Bappeda Provinsi Banten

Sumber : BPS dan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada Tahun 2015-2016 terjadi perlambatan sebesar 0,14% (5,40 ke 5,26) hal ini disebabkan krisis

ekonomi global sampai saat ini belum selesai di berbagai belahan dunia terutama di Negara-negara Eropa. Krisis tersebut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional dan regional di seluruh Indonesia. Provinsi Banten dikenal sebagai provinsi industri dimana hampir semua perusahaan besar yang ada pangsa pasarnya adalah Negara-negara Eropa, dikarenakan sampai hari ini kondisi ekonomi Negara-negara tersebut belum menunjukkan perbaikan maka permintaan terhadap produk-produk industri Banten sampai saat ini masih melemah. Kondisi ini dibuktikan selisih ekspor impor dua tahun terakhir ini tidak begitu menggembirakan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten.

Namun demikian perkembangan ekonomi dunia Tahun 2018 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan Tahun 2016-2017, adapun yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia Tahun 2018 adalah prospek dari negara-negara berkembang yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Perkembangan ekonomi nasional juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi ditopang oleh konsumsi dan investasi pemerintah sebagaimana tercermin pada percepatan belanja modal awal Tahun 2017.

Investasi diperkirakan juga akan tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan dukungan dari pemerintah. Rating investasi Indonesia juga mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang cukup stabil ditengah ketidakpastian eksternal, disertai dengan kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang proaktif. Sementara kinerja ekspor diperkirakan tumbuh terbatas seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang masih moderat. Namun demikian proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten Tahun 2018 diperkirakan tumbuh dikisaran 5,85%.

Perkembangan perekonomian di Provinsi Banten akan menarik investasi lebih besar dengan terus naiknya PMA dan PMDN. Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN ini lebih banyak fokus kepada industri manufaktur dan jasa, sektor industri untuk dapat mengembangkan usahanya terutama pada industri kecil dan menengah. Kedua sektor andalan Provinsi Banten tersebut (UMKM-K dan Industri) apabila terus dipacu untuk berkembang maka akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi di Provinsi Banten yang cukup baik apabila terus dipertahankan dan ditingkatkan maka akan mengundang banyak investor untuk terus menanamkan modalnya di Provinsi Banten. Kemudian untuk meningkatkan kinerja suatu industri agar dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan juga tenaga kerja yang terampil. Selain faktor investasi dan tenaga terampil tersebut, faktor konsumsi masyarakat juga membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, semakin tinggi konsumsi masyarakat maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi publik maupun swasta; kedua, tren positif kondisi perekonomian Banten ini akan semakin menarik investor untuk berinvestasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Tabel 3.4
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
di Provinsi Banten Tahun 2013- 2017

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Investasi (milyar rupiah)	Proyek	Investasi (US\$. Juta)
2013	100	4.008,66	592	3.720,2
2014	100	8,081.3	709	2,034.6
2015	367	10,709.9	1.737	2,542.0
2016	496	12,426.3	2.161	2,912.1
2017	699	15.141,9	2.479	3,047.5

Sumber: BKPM RI Tahun 2017

Pada tahun 2017, untuk PMDN Banten masuk peringkat lima setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara kumulatif sepanjang Januari-Desember 2017, realisasi investasi mencapai Rp 15.141,9 triliun, dibanding capaian tahun 2016 sebesar Rp 12.426,3 triliun. Ada pun periode januari – desember 2017 menjadi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 3.047,5 triliun dibanding capaian 2016 sebesar Rp 2.912,1 triliun.

3.1.2 Inflasi

a. Inflasi Menurut Pengeluaran

Memasuki bulan Januari tahun 2018, harga barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka Indeks Harga Konsumen (IHK)

dari 138,47 pada bulan Desember menjadi 138,77 pada bulan Januari atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,22 persen.

Enam dari tujuh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks, yaitu berturut-turut: kelompok bahan makanan yang naik sebesar 1,26 persen; kelompok sandang naik sebesar 0,24 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga naik sebesar 0,22 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik sebesar 0,16 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang naik sebesar 0,11 persen serta kelompok kesehatan naik sebesar 0,10 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan turun sebesar 0,97 persen;

Tabel 3.5

IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten
Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Januari 2018 (2012=100)

Kelompok Pengeluaran (1)	IHK Januari 2017 (2)	IHK Desember 2017 (3)	IHK Januari 2018 (4)	Inflasi Januari 2018 *) (5)	Laju Inflasi Tahun 2018 **) (6)	Inflasi "Year on Year" ***) (7)
U M U M	134,13	138,47	138,77	0,22	0,22	3,47
1. Bahan Makanan	147,89	148,93	150,81	1,26	1,26	1,98
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	146,76	153,88	154,06	0,11	0,11	4,97
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	125,12	130,14	130,35	0,16	0,16	4,18
4. Sandang	111,97	114,64	114,91	0,24	0,24	2,63
5. Kesehatan	131,31	135,57	135,71	0,10	0,10	3,35
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	127,73	136,08	136,38	0,22	0,22	6,77
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	128,14	130,96	129,69	-0,97	-0,97	1,21

Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018

b. Perkembangan Inflasi Kota Serang, Tangerang dan Cilegon Bulan Januari 2018

Pada bulan Januari 2018, perkembangan harga barang dan jasa (inflasi) di tiga kota IHK di Banten adalah sebagai berikut : Kota Serang 0,91 persen, Kota Tangerang 0,04 persen dan Kota Cilegon 0,41 persen. Laju

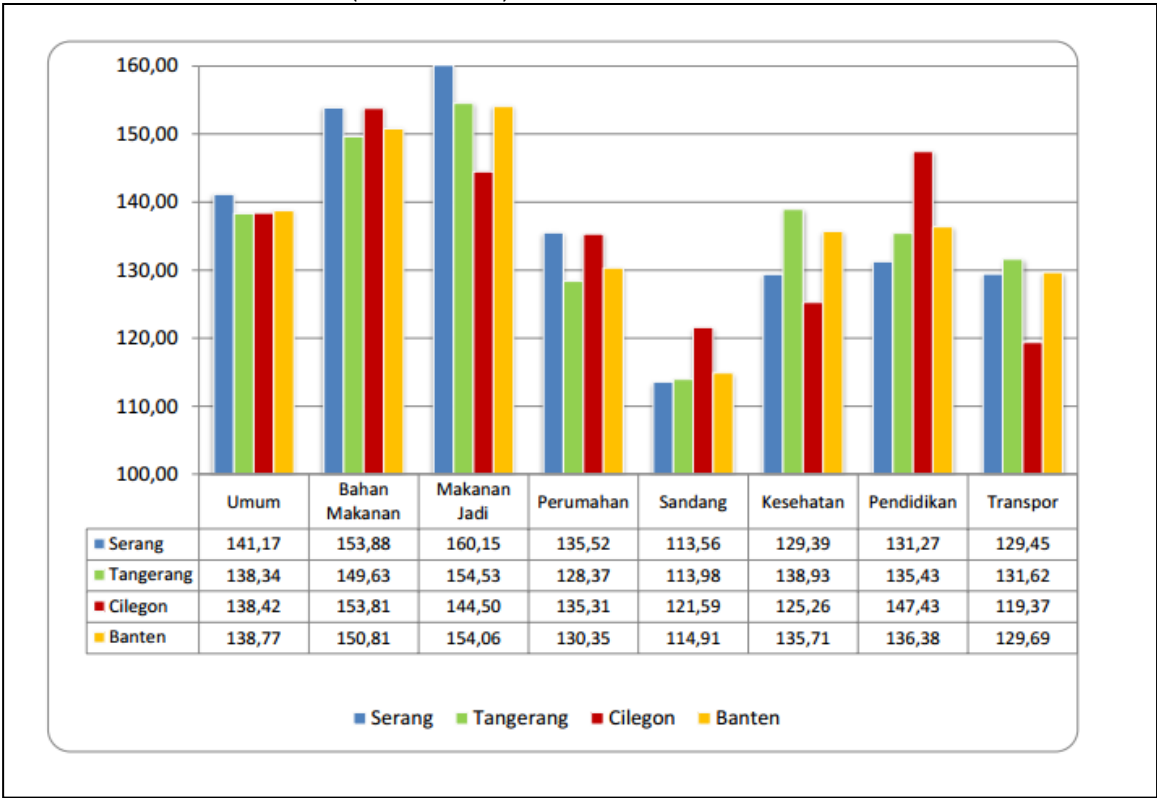
inflasi tahun kalendernya adalah Kota Serang 0,91 persen; Kota Tangerang 0,04 persen dan Kota Cilegon 0,41 persen.

Tabel 3.6
IHK, Inflasi, Laju Inflasi Kota Serang, Tangerang dan Cilegon
Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Januari 2018 (2012 = 100)

Kelompok Pengeluaran	Serang			Tangerang			Cilegon		
	IHK Januari 2018	Inflasi Januari 2018 *)	Inflasi Tahun Kalender **)	IHK Januari 2018	Inflasi Januari 2018 *)	Inflasi Tahun Kalender **)	IHK Januari 2018	Inflasi Januari 2018 *)	Inflasi Tahun Kalender **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
U M U M	141,17	0,91	0,91	138,34	0,04	0,04	138,42	0,41	0,41
1. Bahan Makanan	153,88	2,56	2,56	149,63	0,96	0,96	153,81	1,40	1,40
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	160,15	0,54	0,54	154,53	0,03	0,03	144,50	0,04	0,04
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	135,52	1,03	1,03	128,37	0,02	0,02	135,31	-0,09	-0,09
4. Sandang	113,56	0,34	0,34	113,98	0,28	0,28	121,59	-0,12	-0,12
5. Kesehatan	129,39	0,19	0,19	138,93	0,04	0,04	125,26	0,36	0,36
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	131,27	-0,02	-0,02	135,43	0,32	0,32	147,43	-0,01	-0,01
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	129,45	-0,15	-0,15	131,62	-1,33	-1,33	119,37	0,28	0,28

Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018

Gambar 3.4
Perkembangan IHK Kota Serang, Tangerang, Cilegon dan Banten
(2012=100) Bulan Januari 2018



Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018

Tabel 3.7
Proyeksi Inflasi Provinsi Banten
Tahun 2017-2018 (%)

Indikator	2016	2017 (Angka Proyeksi)*			2018 (Angka Proyeksi)*		
		Optimis	Moderat	Pesimis	Optimis	Moderat	Pesimis
Inflasi (Persen)	2.77	3.00	4.00	5.00	2.94	4.50	5.50

Keterangan: * adalah angka proyeksi Bappeda Provinsi Banten
Sumber: No. 06/02/36/Th.XI, 1 Februari 2017

3.1.3 ICOR

3.1.3.1 Nilai ICOR Total

Pertumbuhan ekonomi Banten selama periode Tahun 2014-2017 rata-rata sebesar 5,42 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yaitu sebesar 5,51 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 5,26 persen. Sedangkan nilai PDRB Banten (adh Berlaku) selama periode Tahun 2014-2017 menunjukkan peningkatan

signifikan dari 428.740,06 milyar rupiah menjadi 563.820,35 milyar rupiah.

Adapun pengeluaran untuk kapital (PMTB) selama periode tahun 2014-2016 memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 32-34 persen, dengan nilai rata-rata sebesar 92.388,650 milyar rupiah. Data pada tabel 3.8 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014-2018 dengan proyeksi tahun 2018 cenderung meningkat dari 2,91 persen (2014) menjadi 5,16 persen (2016).

Tabel 3.8
Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Banten, 2014—2018

Uraian	2014	2015	2016	2017 (Angka Proyeksi)*	2018 (Angka Proyeksi)*
1. PMTB adhb	124,100,207	139,910,911	152,042,587	168,062,707	188,102,025
a. Bangunan					
a. 1. Nilai (Juta Rupiah)	81,902,666	92,729,170	102,534,116		
a. 2.Persentase	66.00	66.28	67.44		
b. Non Bangunan					
b. 1. Nilai (Juta Rupiah)	42,197,541	47,181,741	49,508,471		
b. 2.Persentase	34.00	33.72	32.56		
2. PMTB adhk 2010	103,115,307	108,982,067	114,601,617	120,629,119	127,290,865
a. Bangunan					
a. 1. Nilai (Juta Rupiah)	69,848,849	74,592,481	79,620,457		
a. 2.Persentase	67.74	68.44	69.48		
b. Non Bangunan					
b. 1. Nilai (Juta Rupiah)	33,266,458	34,389,587	34,981,160		
b. 2.Persentase	32.26	31.56	30.52		
3. Pertumbuhan PMTB adhk 2010 (Persen)	2.91	5.69	5.16	5.26	5.52
a. Bangunan	4.31	6.79	6.74		
b. Non Bangunan	0.10	3.38	1.72		

Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Banten proyeksi*

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2014 – 2016. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada Tahun 2014 sebesar 4,31 persen. Keadaan ini meningkat di Tahun 2016 yaitu menjadi 6,74 persen, meskipun pada Tahun 2015 sempat pulih hingga mencapai pertumbuhan sebesar 6,79 persen. Sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda dengan bangunan. Pada Tahun 2014 sub komponen non bangunan tumbuh sebesar 0,10 persen. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya mulai meningkat menjadi sebesar 3,38 persen (2015), sedangkan pada Tahun 2016 menurun sebesar 1,72 persen.

Secara umum, selama kurun waktu Tahun 2014-2016 pertumbuhan PMTB terus mengalami peningkatan di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2015 yang mencapai besaran 5,69 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2014 yaitu hanya sebesar 2,91 persen, dengan proyeksi tahun 2017 dan 2018 sebesar 5,26%.

3.1.3.2 Nilai ICOR Sektoral

Sebagaimana diketahui koefisien ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Dalam pembahasan ini tambahan kapital (investasi) baru adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya PMTB dengan tambahan output. Karena unit PMTB bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Tabel 3.9 menunjukkan besaran koefisien ICOR akumulasi periode 2010-2014 di Provinsi Banten menurut kategori industri. Kategori yang mempunyai koefisien ICOR paling kecil adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan koefisien ICOR hanya 0,87. Artinya setiap penambahan Rp.1 milyar output hanya memerlukan PMTB sebesar 870 juta rupiah. Hal

ini menunjukkan bahwa kegiatan investasi pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sangat efisien, karena untuk meningkatkan ouputnya memerlukan investasi fisik (PMTB) yang lebih sedikit. Berikutnya kategori dengan koefisien ICOR kurang dari 2 adalah kategori Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi kendaraan (1.17), Jasa keuangan (1.53), dan Kategori Konstruksi (1,84). Kategori industri dengan koefisien ICOR antara 2 dan 3 berikutnya adalah kategori Real Estate (2,18), Jasa Lainnya (2.73), serta Kategori Jasa Perusahaan (2,78).

Dalam hal ini dapat dilihat juga rata ICOR secara keseluruhan periode 2011-2015, 2012-2016 dan persentase proyeksi 2013-2017.

Tabel 3.9
Koefisien ICOR Akumulasi Tahun 2010-2014
di Provinsi Banten Menurut Kategori

ICOR lag 5 Tahun Menurut Katagori		2010-2014
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,87
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,20
3.	Industri Pengolahan	7,06
4.	Pengadaan Listrik, Gas	8,74
5.	Pengadaaan Air	6,80
6.	Konstruksi	1,84
7.	Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Kendaraan	1,17
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,58
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66
10.	Informasi dan Komunikasi	5,01
11.	Jasa Keuangan	1,53
12.	Real Estate	2,18
13.	Jasa perusahaan	2,78
14.	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,18
15.	Jasa Pendidikan	3,92
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,69
17.	jasa Lainnya	2,73
Total		4,55

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Kategori industri yang lainnya mempunyai koefisien ICOR lebih besar dari 3. Dapat dikatakan bahwa kegiatan investasi/PMTB pada kategori industri tersebut kurang efisien jika dibandingkan dengan kategori industri yang tersebut di atas. Kategori industri Transportasi dan Pergudangan, serta Kategori Administrasi Pemerintahan Umum dan Jaminan Sosial wajib mempunyai koefisien ICOR yang besar yaitu 10,58 dan 13,18. Artinya PMTB pada kedua sektor tersebut tidak efisien. Khusus untuk Kategori Administrasi Pemerintah ketidakefisienan investasi pada kategori ini menyangkut investasi besar pada sektor layanan dan fasilitas umum

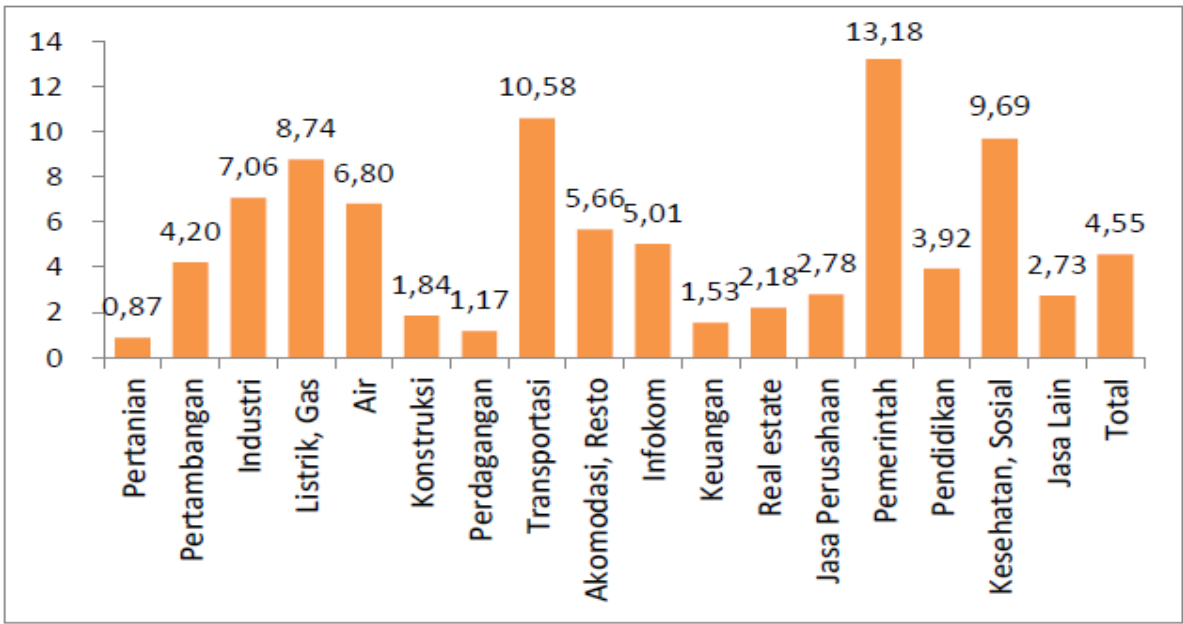
dimana nilai outputnya dijual dibawah harga pasar, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, serta konstruksi publik lainnya.

Tabel 3.10
Koefisien ICOR Akumulasi Tahun 2010-2017
di Provinsi Banten Menurut Kategori

Indikator	2010-2014	2011-2015	2012-2016	Angka Proyeksi 2013-2017	Angka Proyeksi 2014-2018
ICOR Tahunan	4.97	5.14	5.39	5.56	5.65

Sumber : Bappeda Provinsi Banten proyeksi

Gambar 3.5
Grafik Nilai ICOR Akumulasi 2010-2014 Provinsi Banten



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Perkembangan ICOR lag 0 dari Tahun 2010 hingga Tahun 2014 di Provinsi Banten. Koefisien ICOR yang terbentuk mengalami fluktuasi pada beberapa tahun, dimana penurunan ICOR terjadi pada Tahun 2011 dari 4,88 menjadi 4,65, serta Tahun 2013 dari 4,87 menjadi 4,53. Sementara kenaikan tertinggi koefisien ICOR terjadi pada Tahun 2014 dari 4,53 tahun sebelumnya menjadi 5,69, Hal ini kemungkinan terjadi karena situasi ekonomi global yang mempengaruhi proses produksi domestik ditambah situasi politik dalam negeri yang sedang melaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Tabel 3.12
 Nilai Koefisien ICOR Lag 0 Menurut Kategori
 Provinsi Banten Tahun 2010-2014

ICOR lag 0 Menurut Katagori		2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
1		2	3	4	5	6	7
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,41	1,18	1,09	0,80	1,82	1,06
2.	Pertambangan dan Penggalian	7,59	0,37	(27,31)	(0,57)	0,24	2,73
3.	Industri Penolahan	9,08	6,49	8,16	3,79	123,72	6,88
4.	Pengadaan Listrik, Gas	1,08	43,78	8,80	(29,29)	10,57	6,82
5.	Pengadaaan Air	5,92	2,90	36,64	9,33	7,39	12,44
6.	Konstruksi	3,61	2,42	2,06	1,71	1,29	2,22
7.	Perdagangan Besar, Eceram, dan Reparasi Kendaraan	1,34	0,83	1,07	1,78	1,72	1,35
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,91	9,37	7,72	17,70	14,41	12,02
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,72	5,60	9,63	10,25	4,45	7,13
10.	Informasi dan Komunikasi	5,07	7,45	5,24	8,91	4,20	6,17
11.	Jasa Keuangan	2,54	1,22	1,29	1,52	1,52	1,62
12.	Real Estate	1,78	2,55	2,69	3,10	2,13	2,45
13.	Jasa perusahaan	3,27	3,11	3,40	4,13	2,04	3,19
14.	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,82	25,33	16,59	92,11	7,10	31,39
15.	Jasa Pendidikan	3,43	4,71	5,21	7,53	4,72	5,12
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,39	11,07	5,52	31,02	11,25	15,45
17.	jasa Lainnya	3,22	3,80	4,13	3,91	1,59	3,93
Total		4,88	4,65	4,87	4,53	5,69	4,92

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Pada ICOR log 0, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi kategori industri yang memiliki efisiensi investasi yang paling efisien dengan rata-rata koefisien ICOR sebesar 1,06, disusul kemudian oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Kendaraan dengan rata-rata ICOR sebesar 1,35, serta kategori Jasa Keuangan dengan rata-rata ICOR sebesar 1,62. Sementara kategori dengan rata-rata ICOR besar, terdapat pada kategori Administrasi Pemerintahan Umum (31,39), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (15,45), serta kategori Pengadaan Air Bersih (12,44).

Tabel 3.13
 Nilai Koefisien ICOR

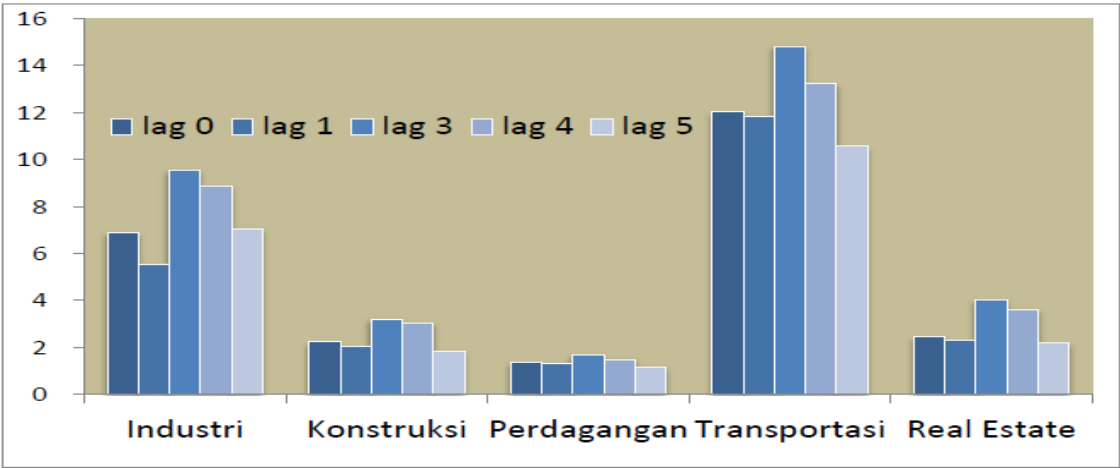
Provinsi Banten Tahun Proyeksi Tahun 2015 – 2018

Indikator	2015	2016	2017 (Angka Proyeksi)	2018 (Angka Proyeksi)
ICOR Tahunan	5.78	5.91	5.66	5.32

Perekonomian Banten selama periode Tahun 2010-2014 didominasi oleh aktifitas kategori manufaktur, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan real estate hingga sebesar 71 persen dari total PDRB Banten. Dari kelima kategori industri utama tersebut kategori Perdagangan Besar Eceran, dan Reparasi Kendaraan serta merupakan kategori paling efisiensi dalam investasi dibandingkan kategori utama lainnya pada berbagai lag ICOR yang diamati. Sedangkan kategori industri manufaktur atau industri pengolahan sebagai kategori terbesar dalam pembentukan PDRB Banten ternyata kurang efisien dilihat dari koefisien ICOR baik di lag 0, lag 3, maupun lag 5.

Namun demikian perkembangan ICOR setiap tahunnya akan mengalami peningkatan pada tahu 2014 sampai dengan tahun 2016, namun proyeksi tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,66% dan proyeksi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,32%.

Gambar 3.6
Grafik Perbandingan ICOR Kategori Utama Menurut Lag



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Kecenderungannya semakin panjang lag, semakin efisien investasi yg dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Banten mulai melambat dari 7,03 persen di Tahun 2011 menjadi 6,83 persen, padahal arus investasi masih tinggi di Tahun 2012-2013 terutama investasi pada industri padat modal seperti industri logam dasar, dan barang dari logam. Akibatnya nilai koefisien ICOR naik pada lag 3 dan turun kembali pada lag 4 dan lag 5.

Peningkatan efisiensi pada beberapa sektor dapat dikurangi dengan melancarkan transportasi dan komunikaskasi agar proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Peningkatan infrastruktur transportasi dan komunikasi merupakan upaya pembangunan yang tepat dengan disertai ketepatan lokasi alokasinya;

Mengingat nilai ICOR yang masih cukup tinggi dan dominasi usaha mikro kecil pada sruktur usaha di Provinsi Banten maka perlu rekayasa teknologi tepat guna yang efisien dan efektif yang bisa diadopsi oleh kalangan pengusaha mikro kecil sehingga proses produksi mereka menjadi semakin efisien. Selain itu diperlukan pembinaan manajerial dalam pembiayaan, pengelolaan usaha, dan informasi pasar. Perlu dibangun semangat kewirausahaan bagi masyarakat Provinsi Banten.

3.1.4 Ketenagakerjaan

Pada periode Agustus 2016 - Agustus 2017 jumlah angkatan kerja mengalami sedikit peningkatan dari 5,59 juta orang pada Agustus 2016 menjadi 5,60 juta orang pada Agustus 2017. Namun sayangnya, peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pengangguran sebesar 21 ribu pada periode tersebut. Jumlah penduduk bekerja justru mengalami penurunan dari 5,09 juta orang menjadi 5,08 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 63,66 persen menjadi 62,32 persen. Menurunnya TPAK ini merupakan indikasi adanya penurunan suplai tenaga kerja.

Tabel 3.14
 Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Februari 2016-Agustus 2017

	Jenis Kegiatan Utama	2016		2017	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
1.	Penduduk 15+ (000)	8.673	8.775	8.879	8.981
2.	Angkatan Kerja	5.686	5.587	5.969	5.597
	Bekerja (000)	5.234	5.088	5.507	5.077
	Penganggur(000)	452	499	462	520
3.	Bukan Angkatan Kerja (000)	2.987	3.188	2.909	3.384
	Sekolah	875	722	731	852

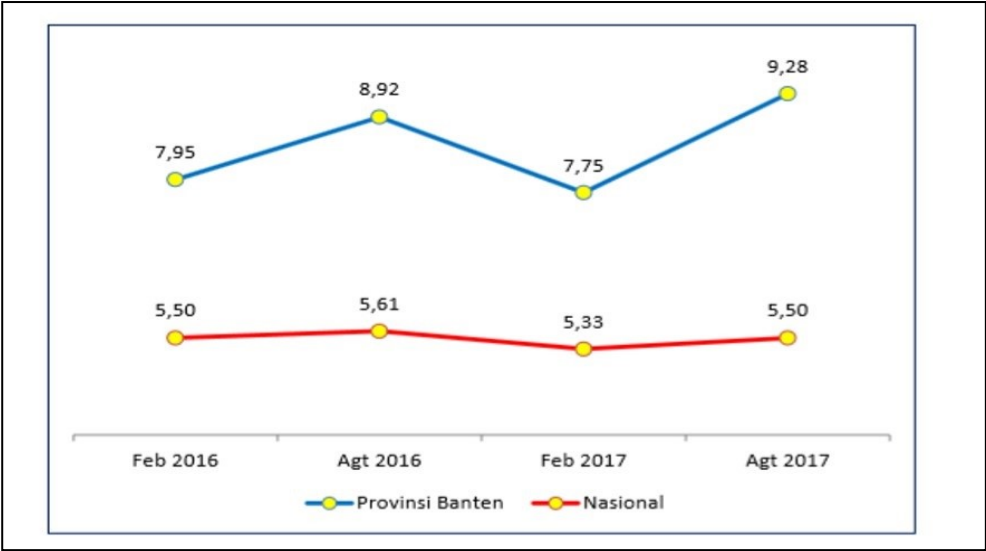
	Mengurus Rumah Tangga	1.748	2.066	1.845	2.133
	Lainnya	363	399	333	399
4.	TPAK (%)	65,56	63,66	67,23	62,32
5.	TPT (%)	7,95	8,92	7,75	9,28
6.	Pekerja tidak penuh/Setengah Pengangguran	1.089	936	1.086	864
	Setengah penganggur/ST Terpaksa	407	398	317	249
	Paruh Waktu/SP Sukarela	681	537	769	615

Sumber : BRS No. 66/ 11/ 36/ Th.XI, 6 November 2017

Indikator lain adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh ialah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (di bawah 35 jam seminggu). Indikator ini dapat menggambarkan ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah. Ada dua kelompok setengah pengangguran: yang masih mencari kerja (setengah pengangguran terpaksa) dan tidak mencari kerja lagi (setengah pengangguran sukarela atau pekerja paruh waktu). Pada Agustus 2017, setengah pengangguran berjumlah 864 ribu atau 17,02 persen dari penduduk bekerja. Sedikit menurun dibanding Agustus 2016 yang sebanyak 936 ribu (18,40 persen).

Setengah Pengangguran Terpaksa menurun selama satu tahun dari 398 ribu pekerja menjadi 249 ribu pekerja.

Gambar 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten dan Nasional, Februari 2016- Agustus 2017 (persen)



Sumber : BRS No. 66/ 11/ 36/ Th.XI, 6 November 2017

Secara relatif angka pengangguran menunjukkan peningkatan dari 8,92 persen pada Agustus 2016 menjadi 9,28 persen pada bulan Agustus 2017. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional. Pada Agustus 2017, angka pengangguran Provinsi Banten menempati peringkat kedua tertinggi nasional setelah Provinsi Maluku. Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten. Di lain pihak, migran masuk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memperoleh pekerjaan di Banten. Kondisi terbaru angka pengangguran di Banten mengalami penurunan yang signifikan menjadi 7,77 persen pada Februari 2018 dibandingkan pada bulan Agustus 2017 yang mencapai 9,28 persen.

Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh ialah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (di bawah 35 jam seminggu). Dikatakan lebih mendalam karena mampu mengungkap dibalik status bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah. Ada dua kelompok setengah pengangguran: yang masih mencari kerja (setengah pengangguran terpaksa) dan tidak mencari kerja lagi (setengah pengangguran sukarela atau pekerja paruh waktu). Pada Agustus 2016, setengah pengangguran berjumlah 936 ribu atau 18,39 persen dari penduduk bekerja. Menurun dibanding Februari 2016 yang sebanyak 1.089 ribu (20,81 persen). Ini merupakan indikasi yang merepresentasikan naiknya produktivitas. Dari dua jenis setengah pengangguran, Setengah Pengangguran Terpaksa menurun selama satu semester dari 407 ribu pekerja menjadi 398 ribu pekerja.

Dilihat dari sisi komposisi pencari kerja menurut pendidikan, pencari kerja di Provinsi Banten umumnya berpendidikan menengah. Persentase pencari kerja yang berpendidikan tinggi (diploma dan sarjana) meningkat dari 7,86 persen menjadi 8,03 persen dari total penduduk bekerja. Begitu juga, persentase pengangguran yang mengenyam pendidikan menengah (SMA/SMK) mengalami kenaikan dari 41,28 persen menjadi 48,17 persen.

Sebaliknya pencari kerja pendidikan rendah mengalami penurunan (SMP ke bawah) dari 50,85 persen menjadi 43,80 persen.

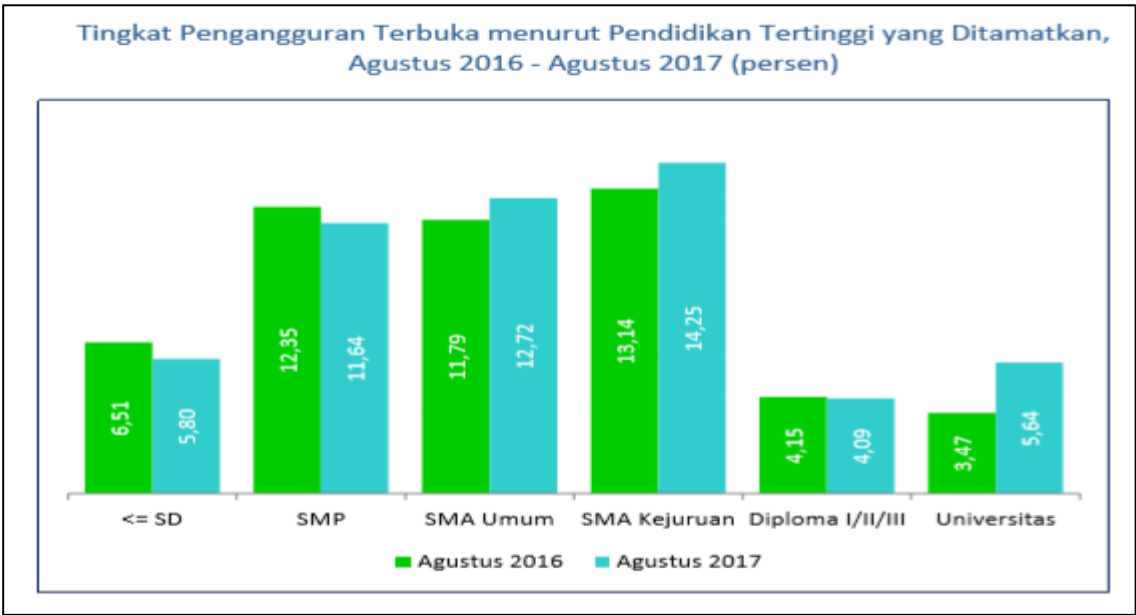
Tabel 3.15

Komposisi Penduduk Bekerja dan Pengangguran menurut Pendidikan di Provinsi Banten, Februari 2016- Agustus 2017 (persen)								
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja				Pengangguran			
	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SD Ke bawah	34,73	34,45	36,43	36,12	32,19	24,48	23,04	21,72
SMP	15,85	16,73	16,85	17,15	18,66	24,07	18,28	22,08
SMA	20,46	18,57	16,91	19,60	17,64	25,34	23,16	27,91
SMK	13,03	12,53	12,90	12,47	23,64	19,34	23,63	20,26
Diploma I/II/III	3,75	3,65	4,67	3,16	2,00	1,61	4,10	1,32
Universitas	12,18	14,07	12,24	11,50	5,86	5,16	7,80	6,71
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BRS No. 66/ 11/36/Th.XI, 6 November 2017

Dilihat dari lulusan jenjang pendidikan, lulusan SMK paling banyak yang berstatus sebagai pencari kerja (14,25 persen). Angka ini lebih banyak dari lulusan SMU yang 12,72 persen. Lulusan perguruan tinggi lebih mudah terserap di pasar kerja, hanya 4,09 persen lulusan Diploma dan 5,64 persen lulusan Sarjana yang menganggur. Pada lulusan pendidikan rendah (SD ke bawah) juga banyak terserap di lapangan kerja tetapi mereka biasanya adalah pekerja informal dan bukan new entry.

Gambar 3.8



Sumber : BRS No. 66/ 11/36/Th.XI, 6 November 2017

3.1.5 Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2017 sebesar 5,45 persen. Angka ini berarti terjadi kenaikan 0,09 poin dibanding semester sebelumnya yang 5,36 persen.

Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,09 poin sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,3 ribu orang dari 657,74 ribu orang pada September 2016 menjadi 675,04 ribu orang pada Maret 2017.

Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,49 menjadi 4,52 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,32 pada September 2016 menjadi 7,61 pada Maret 2017.

Jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami peningkatan. Di perkotaan bertambah 10,9 ribu orang (dari 380,16 ribu orang pada September 2016 menjadi 391,03 ribu orang pada Maret 2017). Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 6,4 ribu orang (dari 277,58 ribu orang pada September 2016 menjadi 284,00 ribu orang pada Maret 2017).

Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2017 mencapai 5,45 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2016, maka selama enam bulan terjadi peningkatan sebesar 0,09 poin setelah rilis semester sebelumnya menunjukkan angka 5,36 persen. Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,49 menjadi 4,52 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,32 pada September 2016 menjadi 7,61 pada Maret 2017.

Sejalan dengan kenaikan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama terjadi penambahan sebesar 17,3 ribu orang dari 657,74 ribu orang pada September 2016 menjadi 675,04 ribu orang pada bulan Maret 2017.

Tabel 3.16
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
September 2016-Maret 2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
September 2016	380,16	4,49
Maret 2017	391,03	4,52
<u>Perdesaan</u>		
September 2016	277,58	7,32
Maret 2017	284,00	7,61
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>		
September 2016	657,74	5,36
Maret 2017	675,04	5,45

Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017

Faktor-faktor penyebab kenaikan angka kemiskinan di Banten periode September 2016-Maret 2017 diantaranya adalah:

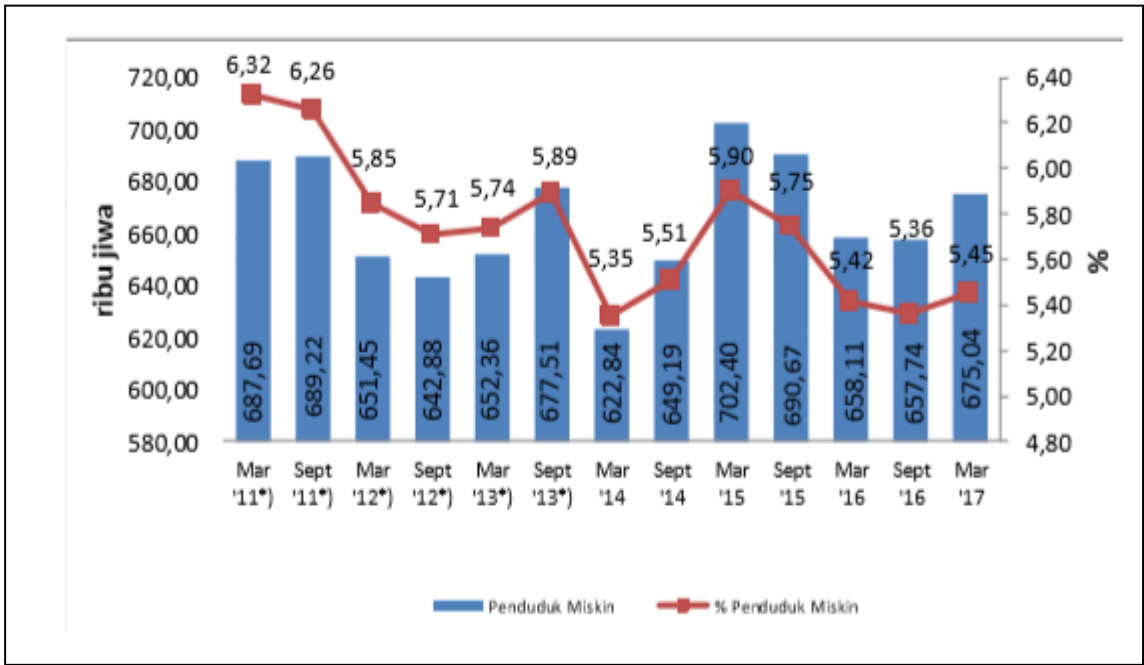
1. Inflasi umum September 2016-Maret 2017 sebesar 2,52 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum Maret-September 2016 sebesar 0,92.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator proxy kesejahteraan petani, pada periode Maret 2017 hanya sebesar 98,19. NTP dibawah 100 berarti petani mengalami defisit, pendapatan yang diterima lebih rendah daripada pengeluarannya. Sedangkan NTP periode September 2016 mencapai 100,47.

Selang periode Maret 2011 sampai Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten cukup fluktuatif. Pada September 2013, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,86 persen dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan inflasi umum yang relatif tinggi akibat kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013. Namun, pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari 677,51 ribu orang pada September 2013 menjadi 622,84 ribu orang.

Penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2014 bertambah 4,23 persen dibanding periode sebelumnya. Periode Maret 2015 jumlah penduduk miskin masih mengalami kenaikan sebesar 53,21 ribu orang. Pada periode-periode selanjutnya, penduduk miskin di Banten terus mengalami penurunan, hingga pada September 2016 persentase penduduk miskin mencapai 5,36 persen atau berkurang sebanyak 370

orang. Keadaan kemiskinan periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Banten kembali meningkat sebanyak 17,3 ribu orang dari periode sebelumnya menjadi 675,04 ribu orang.

Gambar 3.9
Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten, 2011-2017



Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3.5 menyajikan perkembangan Garis Kemiskinan pada periode September 2016-Maret 2017.

Selama periode September 2016-Maret 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,59 persen, yaitu dari Rp 373.365,- per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp 386.753,- per kapita per bulan pada Maret 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2017 adalah sebesar 70,47 persen mengalami sedikit peningkatan dibandingkan September 2016 yang sebesar 70,29 persen.

Tabel 3.17
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah
September 2016-Maret 2017

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
September 2016	261.285	121.618	382.903
Maret 2017	271.751	124.857	396.608
Perubahan (%)	4,01	2,66	3,58
<u>Perdesaan</u>			
September 2016	264.755	86.952	351.708
Maret 2017	274.157	89.431	363.588
Perubahan (%)	3,55	2,85	3,38
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>			
September 2016	262.442	110.923	373.365
Maret 2017	272.552	114.201	386.753
Perubahan (%)	3,85	2,96	3,59

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016-Maret 2017

Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TA 2019

NO	URAIAN	APBD TA 2018	RKPD TAHUN 2019	+ / (-)
a	B	C	d	e = d - c
4	PENDAPATAN DAERAH	10.365.616.979.717	10.844.595.570.400	478.978.590.683
4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.183.868.751.717	6.680.710.148.400	496.841.396.683
4.1.1	Pajak Daerah	5.836.683.600.000	6.303.618.288.000	466.934.688.000
4.1.2	Retribusi Daerah	20.177.648.520	21.791.860.401,60	1.614.211.882
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	54.644.492.380	55.300.000.000	655.507.620
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	272.363.010.817	300.000.000.000	27.636.989.183
4.2	Dana Perimbangan	4.176.078.228.000	4.157.815.422.000	18.262.806.000
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	707.384.582.000	707.384.582.000	0
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.072.903.468.000	1.072.903.468.000	0
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.395.790.178.000	2.377.527.372.000	(18.262.806.000)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.670.000.000	6.070.000.000	400.000.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.670.000.000	6.070.000.000	400.000.000
4.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
4.3.3	Tambahan penghasilan Guru PNSD	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	11.362.380.964.717	11.598.960.292.700	236.579.327.983
5.1	Belanja Tidak Langsung	6.704.423.824.437	7.486.630.709.400	782.206.884.963
5.1.1	Belanja Pegawai	1.757.664.017.909	2.301.876.000.000	54.421.198.2091
5.1.2	Belanja Hibah	2.153.751.721.820	2.128.212.850.000	(25.538.871.820)
5.1.3	Belanja Bantuan Sosial	67.790.400.000	54.479.000.000	(13.311.400.000)
5.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	2.213.484.881.366	2.621.269.383.000	407.784.501.634
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik	460.506.831.000	325.793.476.400	(134.713.354.600)
5.1.6	Belanja Tidak Terduga	51.225.972.342	55.000.000.000	3.774.027.658
5.2	Belanja Langsung	4.657.957.140.280	4.112.329.583.300	545.627.556.980

NO	URAIAN	APBD TA 2018	RKPD TAHUN 2019	+ / (-)
5.2.1	Belanja Pegawai	273.413.783.100		(273.413.783.100)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.195.894.937.116		(2.195.894.937.116)
5.2.3	Belanja Modal	2.188.648.420.064		(2.188.648.420.064)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(996.763.985.000)	(754.364.722.300)	
6	PEMBIAYAAN	996.763.985.000	754.364.722.300	(242.399.262.700)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	996.763.985.000	804.364.722.300	(192.399.262.700)
6.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	996.763.985.000	804.364.722.300	(192.399.262.700)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	50.000.000.000	50.000.000.000
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:	-	300.000.000.000	300.000.000.000
	PT AGRO BISNIS		25.000.000.000	25.000.000.000
	PT BGD		25.000.000.000	25.000.000.000
7	SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	-	-	-

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasionalan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, pendataan potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, penyesuaian pajak progresif, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah, mengoptimalkan penagihan pajak daerah dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada, pelayanan dengan mobil samsat keliling, pelayanan pada event tertentu di

kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam dan lain-lain.

Pendapatan Daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp10.844.595.570.400,00. Rincian Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp6.680.710.148.400,00 terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp6.303.618.288.000,00 yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp21.791.860.400,00 yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp55.300.000.000,00 yang terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp300.000.000.000,00 yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, BULD dan Lain-lain.
2. Dana Perimbangan, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp4.157.815.422.000,00 terdiri atas :
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp707.384.582.000,00. Merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil

Sumberdaya Alam.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp1.072.903.468.000,00. Merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp2.377.527.372.000,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp6.070.000.000,00 yang bersumber dari pendapatan hibah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Banten diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 73,82%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2019 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan PAD dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dan dijadikan andalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah melalui sosialisasi dan penyuluhan, razia pajak daerah, dan penagihan pajak langsung pada masyarakat wajib pajak;
- 5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;

- 6) Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru;
 - 7) Peningkatan kompetensi aparaturnya pemungut pajak daerah;
 - 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak daerah;
 - 9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan.
 - 10) Melihat kecenderungan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang statis, salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2018, yang telah dirintis sejak Tahun 2015 adalah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada OPD serta Unit-unit Pelayanan Teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain meningkatkan daya saing untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, melalui fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, dimana pendapatan BLUD memungkinkan untuk langsung digunakan kembali membiayai pelayanan, langkah ini juga dapat memperluas potensi penerimaan retribusi daerah.
- b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah
- Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK baik itu DAK fisik dan Non Fisik. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp11.598.960.292.700,00 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPJPD Provinsi Banten 2005-2025. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Struktur belanja sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Tidak langsung

Belanja Tidak langsung pada Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp7.486.630.709.400,00. Penganggaran Belanja Tidak langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.301.876.000.000,00;
- 2) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal, pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas- tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Perlu juga diinformasikan bahwa besarnya belanja hibah pada pemerintah provinsi banten lebih didominasi oleh Belanja Hibah Dana BOS untuk Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah. Belanja Hibah tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.128.212.850.000,00;

- 3) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 direncanakan sebesar Rp54.479.000.000,00;
- 4) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.621.269.383.000,00 Penganggarannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota akan ditampung dalam P-APBD Tahun 2019;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Adapun bantuan keuangan khusus ke Pemerintah Kabupaten/ Kota di fokuskan untuk membiayai urusan wajib

pelayanan dasar. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Belanja Bantuan Keuangan tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.325.793.476.400,00;

- 6) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kebencanaan. Belanja Tidak Terduga tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 55.000.000.000,00.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.4.112.329.583.300,00 Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang.

Berdasarkan jenis belanja, Belanja Langsung diklasifikasikan kedalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan

daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;

2) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;

3) Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerja pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan (input), keluaran (output) dan fungsi output (outcome);

4) Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku;

5) Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit ataupun surplus anggaran. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan struktur anggaran dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Pada Tahun 2019 struktur anggaran diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp.754.364.722.300,00. Pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00, untuk penyertaan modal (investasi) PT Agro Bisnis sebesar Rp25.000.000.000,00 dan PT BGD sebesar Rp25.000.000.000,00.